

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEMUDA MELALUI PROGRAM JAMBORE PEMUDA INDONESIA (JPI) DALAM PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Fachriza Ariyadi¹

¹Mahasiswa Magister Administrasi Publik FISIP Unmul
Alamat Korespondensi : jurnal.adm.reform.mianunmul@gmail.com

Abstract

This research is an analysis of the implementation of public policies that specifically focuses and leads to a portrait of the implementation of youth empowerment policies through the Indonesian Youth Jamboree (JPI) Program in youth development in East Kalimantan Province. This study uses a descriptive qualitative methodology. The results showed that the implementation of youth empowerment policies through the JPI program in youth development in East Kalimantan province has generally been going well.

Key Word: Policy, Implementation, Indonesian Youth Jamboree (JPI)

Abstrak

Penelitian ini merupakan kajian analisis implementasi kebijakan publik yang berfokus pada potret penerapan kebijakan pemberdayaan pemuda melalui program Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan pemuda melalui program JPI dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur secara umum sudah berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Kebijakan, Implementasi, Jambore Pemuda Indonesia (JPI)

Pendahuluan

Berdasarkan proyeksi BPS pada tahun 2035 mendatang bonus demografi pemuda Indonesia berjumlah 305,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 28,14 % dari tahun 2010 yang sebesar 238,5 juta jiwa. Bonus demografi pemuda Indonesia sebenarnya adalah peluang dan sekaligus tantangan yang krusial bagi keberlanjutan bangsa Indonesia ke depan. Hal yang terpenting adalah mempersiapkan bonus demografi tersebut menjadi sumberdaya pemuda yang memiliki daya saing, bermanfaat dan menjadi “tonik” bagi pembangunan kepemudaan dengan menciptakan pemuda sebagai *agent of change*, kontrol sosial, pelopor perubahan, teladan dan pemimpin di masa depan.

Program Jambore Pemuda Indonesia (JPI) adalah salah satu dari sekian banyak program yang diamanatkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) kepada instansi daerah yang menangani urusan kepemudaan baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dalam memberikan pelayanan kepemudaan berdasarkan UU No. 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan. Pada Provinsi Kalimantan Timur, program JPI bisa dikatakan sebagai “tonik” yang bisa mengarahkan pemuda untuk menjauhi segala bentuk sumber

masalah yang menyebabkan pembangunan kepemudaan di Kalimantan Timur menjadi terhambat. Program yang mendukung timbulnya interaksi antar pemuda ini, dengan cara berdialog, berdiskusi, bertukar pengalaman dan pemikiran antar pemuda yang diharapkan menimbulkan toleransi dan membuka potensi positif di kalangan pemuda Kaltim, sehingga kegiatan ini bisa menjadi solusi untuk memperkuat solidaritas antar pemuda dan dapat mengembangkan kreativitas dan kemandirian pemuda Kaltim dalam menciptakan jaringan informasi, komunikasi dan bisnis dimasa yang akan datang sehingga secara tidak langsung berdampak pada pembangunan kepemudaan di Kalimantan Timur.

Berdasarkan penelusuran awal, selama pelaksanaan program JPI di Provinsi Kalimantan Timur berjalan hingga tahun 2018 belum ada penelitian dan kajian terkait program ini, baik tentang substansi programnya maupun kebijakan pemberdayaan pemudanya dalam upaya mendukung pembangunan kepemudaan. Kegiatan JPI di Kalimantan Timur dirasakan hanya berdampak pada tingkat individu saja, kecil pada kelompok masyarakat luas. Mengingat sudah lamanya program ini dilaksanakan, namun keberadaan program JPI ini masih belum terasa cukup signifikan dampaknya dalam pembangunan kepemudaan khususnya di provinsi Kalimantan Timur. Padahal pelaksanaan program JPI ini selalu diupayakan digelar oleh Kemenpora setiap tahunnya melalui instansi daerah yang menangani urusan kepemudaan baik di tingkat Provinsi Kalimantan Timur maupun di tingkat Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur. Selain itu, program ini masih belum banyak menyentuh pemuda yang ada di seluruh penjuru Kalimantan Timur, hanya sedikit jumlah pemuda yang berkesempatan mengikuti program JPI ini. Berangkat dari fenomena yang dikemukakan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana penerapan program tersebut sehingga akan terlihat potret pelaksanaan dari kebijakan pemberdayaan pemuda melalui program JPI dalam pembangunan kepemudaan khususnya di provinsi Kalimantan Timur.

Kerangka Konsep dan Teori *Implementasi Kebijakan Publik*

Dalam Indiahono (2017:143) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan menunjuk aktivitas dalam menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Implementasi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dituangkan dalam suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga negara lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang dituangkan dalam kebijakan tersebut. Apabila proses implementasi telah berjalan, maka diharapkan akan muncul suatu keluaran langsung dari kebijakan yaitu hasil segera (*output*) dan dampak (*outcomes*). Hasil segera adalah pengaruh atau akibat jangka pendek yang dihasilkan oleh suatu implementasi kebijakan, sedangkan dampak kebijakan adalah sejumlah akibat yang dihasilkan oleh

implementasi kebijakan yang timbul setelah keluarnya output kebijakan yang melalui proses jangka panjang. Hasil segera dan dampak yang ditimbulkan akan sangat berguna untuk menilai implementasi dari suatu kebijakan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dalam model Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2014:165) adalah sebagai berikut:

1. *Standar (ukuran) dan sasaran kebijakan.* Implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan. Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan sasaran kebijakan secara jelas. Ketika suatu kebijakan tidak memiliki standar dan sasaran yang jelas maka akan menimbulkan kesalahpahaman dan konflik dalam pelaksanaannya.
2. *Sumber daya kebijakan.* Perlunya dukungan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia yang berkualitas dan sumber daya finansial.
3. *Karakteristik badan pelaksana.* Mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, karena akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan.
4. *Komunikasi antar organisasi terkait dan aktivitas kegiatan-kegiatan pelaksanaan.* Komunikasi antar organisasi terkait dan aktivitas kegiatan-kegiatan pelaksanaan agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para implementor yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu komunikasikan dan kordinasikan merupakan hal yang penting agar tujuan dan sasaran dapat tercapai.
5. *Sikap para pelaksana.* Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan yang berhasil bisa jadi gagal karena tidak sepenuhnya menyadari standar dan tujuan kebijakan dan mungkin dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan. Sebaliknya apabila sikap para pelaksana bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut maka implementasi kebijakan akan berhasil.
6. *Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.* Kondisi sosial ekonomi sebuah masyarakat yang maju, sistem politik yang stabil dan demokratis, dukungan baik dari konstituen maupun elit penguasa dan budaya keseharian masyarakat yang mendukung akan mempermudah implementasi sebuah kebijakan.

Pembangunan Kepemudaan

Pembangunan kepemudaan (Pasal 1 Ayat 3 UU 40 Tahun 2009) adalah proses memfasilitasi segala hal berkaitan dengan kepemudaan. Berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda adalah poin penting dalam pembangunan kepemudaan. Tujuan pembangunan kepemudaan yaitu

terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 3 UU 40 Tahun 2009).

Pembangunan kepemudaan secara nasional; Pertama, arah dan landasannya mengacu pada Pancasila, UUD 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Kedua, komponen yang perlu disiapkan antara lain; pemantapan strategi pelayanan kepemudaan, penetapan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, penetapan peran, tanggung jawab dan hak pemuda. Ketiga, inti pelayanan kepemudaan, yakni penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan; Keempat, Faktor pendukung untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang kepemudaan, antara lain; melakukan koordinasi dan kemitraan; menyiapkan sarana dan prasarana, menguatkan organisasi kepemudaan, penguatan peran serta masyarakat, memberikan penghargaan dan menyiapkan pendanaan.

Dalam Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Indonesia, pembangunan kepemudaan dapat ditelisik melalui tiga lapisan, yakni pengembangan individu, pengembangan penghidupan, serta pengembangan partisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam lapisan pengembangan individu, IPP menyertakan 'pendidikan' serta 'kesehatan dan kesejahteraan' sebagai domainnya. Sementara itu, dalam lapisan pengembangan penghidupan, IPP memasukkan 'lapangan dan kesempatan kerja' sebagai domain berikutnya. Selanjutnya adalah pengembangan partisipasi, yang di dalamnya IPP mempertimbangkan 'partisipasi dan kepemimpinan' serta 'gender dan diskriminasi' sebagai dua domain terakhir.

Pemberdayaan Pemuda

Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda (Pasal 1 Ayat 6 UU No. 40 Tahun 2009). Pemberdayaan pemuda pada hakekatnya merupakan pembangunan kapasitas pemuda melalui upaya sistematis yang dilakukan untuk memindahkan kondisi pemuda saat ini kepada kondisi lain yang lebih baik. Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda. Dalam pasal 25 UU No.40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, dijelaskan bahwa pemberdayaan pemuda dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya:

1. Peningkatan iman dan takwa
2. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Penyelenggaraan Pendidikan bela negara dan ketahanan nasional
4. Peneguhan kemandirian ekonomi pemuda
5. Peningkatan kualitas jasmani, seni dan budaya pemuda
6. Peningkatan kemampuan hubungan internasional

7. Peningkatan kemampuan pengelolaan Lembaga kepemudaan
8. Penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan

Berbagai program pemberdayaan pemuda, paling tidak memiliki dua fungsi utama: pertama, program pemberdayaan pemuda berfokus untuk merubah dalam level individu, khususnya dalam hal pemberdayaan psikologi dalam pembangunan kapasitas pribadi (*capacity-building*), mengintegrasikan persepsi-persepsi kontrol dan kendalinya, pendekatan yang proaktif dalam kehidupan, dan pemahaman yang kritis dalam lingkungan sosial dan politik. Sedangkan pemberdayaan pemuda dalam level kolektif berlaku atau terjadi di dalam keluarga, organisasi, dan komunitas, dimana melibatkan proses dan sistem yang dapat meningkatkan keahlian atau kemampuan anggota-anggotanya, memfasilitasi pemuda dalam upaya-upaya perubahan, meningkatkan kesejahteraan kolektif pemuda, dan memperkuat jaringan intra serta ekstra- organisasi untuk memperkuat kualitas dari intregrasi kolektif tersebut. Pemberdayaan pemuda yang dapat menciptakan lingkungan yang ramah dan aman dengan melibatkan peran dan partisipasi aktif dari pemuda di segala level baik individu maupun kolektif di masyarakat adalah tanda keberhasilan dari suatu pemberdayaan pemuda

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini berlangsung di Provinsi Kalimantan Timur. Data yang didapatkan dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner (*online*) yang kemudian dianalisis melalui tahap kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian

Program Jambore Pemuda Indonesia (JPI)

Program Jambore Pemuda Indonesia (JPI) merupakan program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang telah diselenggarakan sejak tahun 1994, dimana pada era tahun 1990an tersebut, program JPI lebih dikenal dengan program Kemah Kesatuan Pemuda (KKP). Perubahan nama kegiatan tersebut berdampak pada muatan substansi kegiatannya. Di awal tahun 2000an hingga sekarang, kegiatan JPI bukan hanya sekedar dimaksudkan untuk menyatukan pemuda-pemuda se-Nusantara dalam bentuk perkemahan saja, melainkan juga untuk memberikan peran terhadap pemuda dalam arti yang lebih luas dengan memanfaatkan kegiatan JPI sebagai wadah untuk mempersiapkan para pemimpin masa depan bangsa Indonesia.

JPI adalah pertemuan akbar para pemuda Indonesia (terdiri dari 34 provinsi) yang dilaksanakan tiap satu kali dalam satu tahun. Rangkaian kegiatan JPI dilaksanakan selama kurang lebih tujuh hari (satu minggu) yang terdiri dari kegiatan kemah pemuda Indonesia, pawai budaya pemuda Indonesia, pentas seni dan budaya, pameran produk kreatif, olahraga bersama, olahraga tradisional, lomba senam kreatif daerah, workshop dan

dialog nasional pemuda serta bakti sosial. Puncak acara JPI biasanya dirangkai dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Secara khusus tujuan dari JPI adalah untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang, meningkatkan daya saing kompetitif pemuda dan meningkatkan kualitas sumber daya pemuda melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Program JPI ditujukan untuk mendukung timbulnya interaksi antar pemuda, berdialog, berdiskusi (isu-isu regional dan nasional yang sedang berkembang), mempelajari budaya, bertukar pengalaman dan pemikiran yang menimbulkan pengertian, penghormatan dan toleransi di kalangan pemuda. Beberapa tanggapan positif dari kegiatan ini bisa menjadi solusi untuk memperkuat solidaritas antar pemuda dalam rangka merajut semangat kesatuan NKRI. Program ini diikuti oleh peserta dari seluruh Provinsi di Indonesia. Dengan mengirimkan peserta sebagai delegasi dari setiap Provinsi. Sebelumnya dilakukan seleksi dari tingkatan Kabupaten/Kota hingga tingkat Provinsi untuk mendapatkan wakil terbaik dari setiap daerah. Proses seleksi dilakukan oleh dinas terkait kepemudaan dengan melakukan berbagai tahapan seleksi untuk menyaring pemuda-pemuda terbaik yang berhak mewakili nama daerah.

Standar (ukuran) dan Sasaran Kebijakan/Program JPI

Dalam implementasinya, Dispora Kaltim melalui Bidang Pemberdayaan Pemuda melaksanakan kegiatan berdasarkan petunjuk teknis dan panduan pelaksanaan JPI yang telah disepakati dan diberikan oleh Kemenpora RI setiap tahunnya. Sejalan dengan model Van Meter dan Van Horn yang menyebutkan bahwa implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari standar (ukuran) dan sasaran kebijakan. Dengan ketentuan standar dan sasaran kebijakan yang jelas tersebut maka tujuan dari implementasi kebijakan dapat tercapai. Rangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan program JPI secara nasional dilaksanakan oleh Kemenpora RI bekerja sama dengan pemerintah daerah provinsi sebagai tuan rumah penyelenggaraan JPI dan stakeholder mitra pembangunan kepemudaan (PPMI) pada setiap tahunnya. Untuk di tingkat daerah provinsi, proses awal dilaksanakan penyeleksian peserta dan selanjutnya pembekalan peserta daerah yang akan mewakili ditingkat nasional. Untuk Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang Pemberdayaan Pemuda Dispora Kaltim menyelenggarakan proses penyeleksian dan pembekalan peserta yang terpilih dari seluruh perwakilan pemuda asal Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Timur. Untuk sasaran dari program JPI ini adalah pemuda-pemudi terbaik dari provinsi Kalimantan Timur yang telah melewati proses seleksi berjenjang di tingkat daerah hingga provinsi yang berhak mewakili provinsi Kalimantan Timur di JPI tingkat nasional dengan muatan wawasan kebangsaan dan rasa cinta kepada tanah air, serta memahami keanekaragaman seni dan budaya dalam memupuk rasa kesatuan dan persatuan bangsa.

Sumber Daya Kebijakan

Sejalan dengan pendapat Van Meter dan Van Horn, keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya kebijakan yang tersedia. Ketersediaan sumber daya kebijakan dalam melaksanakan sebuah program merupakan salah satu faktor yang harus selalu di perhatikan. Perlunya dukungan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia yang berkualitas dan sumber daya finansial adalah kunci keberhasilan selanjutnya dalam implementasi kebijakan pemberdayaan pemuda melalui program JPI dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur. SDM yang terlibat dalam implementasi program JPI sudah cukup memadai dengan dibantu secara keseluruhan baik dari internal Dispora Kaltim sendiri, beberapa tim seleksi dan tim pembekalan peserta serta dukungan penuh dari DPD PPMI Kaltim sebagai mitra pembangunan kepemudaan melalui Program JPI di Provinsi Kalimantan Timur, selain itu, dukungan sumber pendanaan yang cukup dari anggaran yang setiap tahunnya dialokasikan melalui APBD Dispora Kaltim sangat menentukan keberhasilan dalam implementasi program JPI di provinsi Kalimantan Timur.

Karakteristik Badan Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2014:165), dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, karakteristik badan pelaksana harus tepat dengan kebijakannya yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, karena akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan. Karakteristik badan pelaksana kebijakan yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan. Dalam implementasi kebijakan pemberdayaan pemuda melalui program JPI dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur, telah melaksanakan program JPI berdasarkan petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan yang memiliki ketegasan peran pada masing-masing implementator dalam melaksanakan program JPI yang dimuat dalam bentuk Surat Keputusan (SK) dan didalamnya terdapat pengorganisasian pelaksanaan kegiatan (struktur birokrasi), dan telah terjalin dengan baik pola hubungan kerja birokrasi antara pusat dan daerah yang berfokus pada pengawasan dan koordinasinya, baik antara Kemenpora dengan Dispora Kaltim maupun antara Dispora Kaltim dengan Dispora Kabupaten/Kota, serta DPD PPMI Kaltim yang terlibat dalam implementasi kebijakan pemberdayaan pemuda melalui program JPI di Provinsi Kalimantan Timur.

Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Aktivitas Kegiatan Pelaksanaan

Komunikasi antar organisasi terkait dan aktivitas kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam pelaksanaan program JPI dimaksudkan agar kebijakan

dan program yang ada bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai alur yang sudah ditetapkan bersama, apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para implementor yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan dan program JPI, karena itu komunikasi dan koordinasi merupakan hal yang penting agar tujuan dan sasaran dapat tercapai. Dalam implementasinya, bisa dikatakan bahwa Dispora Kaltim telah melaksanakan proses komunikasi dan koordinasi dengan baik melalui rapat koordinasi (menggunakan saluran komunikasi formal maupun nonformal). Komunikasi yang telah terbentuk dimanfaatkan dalam aktivitas kegiatan pelaksanaan mulai dari persiapan, hingga monitoring pelaksanaan. Selain itu, dalam proses komunikasi dan koordinasi antar implementator yang terkait digunakan sebagai bahan evaluasi berdasarkan alur yang sudah ditetapkan untuk memastikan standar dan tujuan yang ada telah tercapai. Hal ini jika dilihat dari kesesuaian dengan model Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2014:165), maka bisa dikatakan bahwa Dispora Kaltim telah melaksanakan proses komunikasi dan koordinasi dengan baik sesuai dengan model yang digunakan melalui rapat koordinasi mulai dari persiapan, monitoring pelaksanaan dan evaluasi sesuai alur yang sudah ditetapkan baik secara formal maupun non formal agar untuk memastikan standar dan tujuan dari implementasi program JPI di Kalimantan Timur telah tercapai sesuai standar dan tujuan yang diharapkan.

Sikap Para Pelaksana dalam Implementasi

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan dalam melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan. Dalam implementasi kebijakan pemberdayaan pemuda melalui program JPI dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur, Sikap dan pemahaman petugas pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan pemberdayaan melalui program JPI ini bisa dikatakan baik, karena sudah menerima dan memahami apa saja yang menjadi standar dan tujuan dari program JPI, baik dari pihak Dispora Kaltim sendiri maupun DPD PPMI Kaltim sebagai mitra Dispora Kaltim dalam pelaksanaan program JPI, mulai dari proses seleksi sampai proses pembekalan peserta di tingkat provinsi Kalimantan Timur, serta sampai dengan pelaksanaan JPI ditingkat nasional. Sejalan dengan pendapat Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2014:165), bahwa sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa sikap penerimaan mengenai program JPI dalam pembangunan kepemudaan di provinsi Kalimantan Timur ini merupakan salah satu hal positif dari program JPI yang dapat berjalan dengan baik dan bisa dilaksanakan secara berkelanjutan.

Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Point terakhir yang juga perlu untuk diperhatikan agar dapat melihat sejauh mana capaian kinerja dalam implementasi kebijakan publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik dimana implementasi program dilakukan. Kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil ketika implementasi dalam situasi dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif. Maka dari itulah, upaya dalam mengimplementasikan suatu kebijakan harus pula memperhatikan kondusifitas lingkungan sekitar dimana kebijakan publik di implementasikan. Kondisi sosial ekonomi sebuah masyarakat yang maju, sistem politik yang stabil dan demokratis, dukungan baik dari pemerintah maupun elit penguasa dan budaya keseharian masyarakat yang mendukung akan mempermudah implementasi sebuah kebijakan. Kondisi lingkungan ekonomi, masyarakat Kalimantan Timur bisa dikatakan baik serta sistem politik dan pemerintahan yang stabil dan kondusif yang mendukung kegiatan JPI ini berjalan dengan lancar dan sukses.

Pengaruh dan dukungan publik dalam kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik dalam kebijakan pemberdayaan pemuda melalui program JPI ini juga terlihat pada stand pameran yang ditampilkan para peserta JPI perwakilan Kalimantan Timur yang menampilkan hasil kerajinan dan segala kreatifitas pemuda di setiap daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dampak ekonomi dan sosial melalui kegiatan ini dilihat sangat membantu bagi peserta JPI perwakilan Kalimantan Timur sendiri dalam menghidupkan perekonomian menengah kebawah melalui hasil penjualan produk kerajinan, selain itu peserta perakilan Kalimantan Timur juga bisa saling bertukar informasi dan komunikasi antar peserta baik sesama provinsi Kalimantan Timur sendiri maupun peserta dari provinsi lain, sehingga kehidupan bersosial sangat terbuka dan sangat membantu menambah jaringan komunikasi bagi peserta yang diharapkan akan bermanfaat di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diartikan bahwa pengaruh politik tentunya berpengaruh dalam kegiatan JPI dengan melibatkan jajaran kementerian dan dinas dinas kepemudaan yang terkait di setiap daerah. Dispora Kaltim dituntut untuk menjalin hubungan baik dengan Kemenpora RI sebagai *leading* sektor pelaksana kegiatan, maupun dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sendiri untuk mengawal anggaran kegiatan agar terpenuhi serta selain itu hubungan baik dengan Dispora Kabupaten/Kota juga diperlukan dalam persamaan persepsi dan pandangan dalam upaya pemberdayaan pemuda di daerah masing-masing untuk sinergisitas pembangunan kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur.

Sejalan dengan pendapat Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2014:165), kondisi sosial ekonomi sebuah masyarakat yang maju, sistem politik yang stabil dan demokratis, dukungan baik dari konstituen maupun elit penguasa dan budaya keseharian masyarakat yang mendukung akan mempermudah implementasi sebuah kebijakan. Hal inilah yang menjadikan

implementasi kebijakan pemberdayaan pemuda melalui program JPI dalam pembangunan kepemudaan di provinsi Kalimantan Timur dapat berjalan dengan baik, lancar dan sukses karena dipengaruhi oleh kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang mendukung dalam implementasi program JPI di provinsi Kalimantan Timur.

Selain itu kondisi sosial yang sangat terbuka dan sangat membantu bagi peserta program JPI dalam menambah jaringan komunikasi yang akan bermanfaat untuk masa yang akan datang. Selanjutnya, program JPI dirasakan berdampak pada pembangunan kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur dengan bentuk nyatanya dapat meningkatkan kehidupan para alumni/purna program JPI baik dalam partisipasi di berbagai bidang kehidupan, kepemimpinan dan kesetaraan gender, maupun dalam bidang pendidikan dan kesehatan sebagai pengembangan individu bagi para alumni/purna program JPI serta dalam mengembangkan potensi dan peluang ekonomi, sehingga menciptakan lapangan dan kesempatan kerja baik bagi diri sendiri maupun pemuda lainnya di Provinsi Kalimantan Timur.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam implementasi kebijakan pemberdayaan pemuda melalui program JPI dalam pembangunan kepemudaan di provinsi Kalimantan Timur

Faktor pendukung dan faktor penghambat sangat menentukan dalam pencapaian keberhasilan ataupun kegagalan pada implementasi suatu kebijakan, tak terkecuali dalam implementasi kebijakan pemberdayaan pemuda melalui Program JPI dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur.

Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pemberdayaan pemuda melalui program JPI dalam pembangunan kepemudaan di Kalimantan Timur ini adalah:

- a. Ketersediaan anggaran, peluang keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan pemuda melalui program JPI ini sangat ditentukan besar atau kecilnya anggaran yang disiapkan melalui APBD Dispora Kaltim. Sebab semua rangkaian kegiatan program JPI mulai dari tahapan seleksi peserta, pembekalan dan sampai persiapan keberangkatan peserta ke tingkat nasional pun memerlukan biaya. Sehingga bisa dikatakan bahwa ukuran keberhasilan dalam implementasi kebijakan pemberdayaan melalui program JPI dilihat dari kecukupan anggaran yang diperlukan.
- b. Petunjuk teknis, standar dan sasaran kebijakan yang jelas melalui petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan program JPI sangat diperlukan setiap tahunnya untuk mengetahui ukuran standar yang ditetapkan dan untuk memudahkan dalam merancang persiapan peserta program JPI demi keberhasilan pencapaian tujuan dalam implementasi kebijakan.
- c. Koordinasi dan komitmen pelaksana, koordinasi dibutuhkan sebagai bahan sarana komunikasi guna memonitoring, mengevaluasi dan pelaporan untuk memastikan pencapaian standar dan tujuan kebijakan pemberdayaan pemuda melalui program JPI sesuai dengan standar dan

tujuan yang diharapkan oleh pelaksana kegiatan. Sedangkan komitmen pelaksana diperlukan untuk melihat sejauh mana sikap dan respon penerimaan para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut agar mencapai standar dan tujuan yang diharapkan.

- d. Dukungan penuh dari PPMI Kaltim, sebagai salah satu SDM dan mitra pembangunan kepemudaan melalui program JPI di Provinsi Kalimantan Timur, Dispora Kaltim membutuhkan peran serta dukungan penuh dari DPD PPMI Kaltim dalam bersama-sama turut mengimplementasikan program JPI ini tiap tahunnya. Karena apabila SDM yang terlibat dalam implementasi kebijakan yang tidak didukung oleh sumber daya manusia yang tepat akan sulit merealisasikan tujuan-tujuan dan keberhasilan dalam implementasi kebijakan

Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pemberdayaan pemuda melalui program JPI dalam pembangunan kepemudaan di Kalimantan Timur adalah:

- a. Waktu persiapan yang sedikit, proses rangkaian kegiatan JPI yang tergolong panjang dan butuh waktu yang lebih banyak mulai dari persiapan kegiatan, seleksi peserta, pembekalan sampai keberangkatan peserta ke tingkat nasional sangat membutuhkan waktu yang cukup dalam mempersiapkan tim agar bisa maksimal menjalani program JPI di tingkat nasional. Kendala ini yang pernah dialami Dispora Kaltim dalam implementasi kebijakan pemberdayaan pemuda melalui program JPI ini dalam pembangunan kepemudaan di provinsi Kalimantan Timur, yaitu keterbatasan waktu dalam persiapan peserta, mulai dari tahap seleksi sampai pembekalan yang waktunya berdekatan dengan jadwal keberangkatan peserta ke tingkat nasional, sehingga target dan tujuan yang diharapkan agar tercapai melalui program JPI ini di tingkat nasional, karena keterbatasan waktu persiapan yang kurang menyebabkan hasil yang di dapat kurang maksimal.
- b. Tuan rumah penyelenggara program JPI yang tidak siap, Faktor ini menjadi pemicu kegagalan dalam implementasi kebijakan pemberdayaan pemuda melalui program JPI, baik ditingkat nasional sekalipun maupun di tingkat daerah provinsi. Ketidaksiapan tuan rumah sangat ditentukan oleh komitmen implementator dalam melaksanakan program JPI berdasarkan standar (ukuran) dan tujuan yang sudah ditetapkan. Kesiapan tuan rumah harus dimatangkan dari seluruh aspek yang menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan Program JPI agar standar (ukuran) dan tujuan bisa tercapai sebagaimana yang sudah ditetapkan.
- c. Komunikasi dan koordinasi pelaksana yang tidak berjalan dengan baik. Hal ini menjadi pemicu terhambatnya proses implementasi kebijakan pemberdayaan pemuda melalui program JPI dalam pembangunan kepemudaan di provinsi Kalimantan Timur. Komunikasi dan koordinasi yang tidak terbuka dan tidak dilakukan monitoring secara berkelanjutan mengakibatkan terhambatnya pencapaian standar dan tujuan kebijakan

- pemberdayaan pemuda melalui program JPI sesuai dengan yang diharapkan oleh pelaksana kegiatan
- d. Serta kurangnya dukungan pemerintah daerah dalam memberikan kegiatan setelah program JPI selesai dilaksanakan. Walaupun secara umum pemerintah sudah melibatkan para alumni/purna program JPI melalui DPD PPMI, namun kondisi di lapangan tidak semua daerah khususnya di Kab/Kota yang melibatkan para alumni/purna program JPI dalam implementasinya. Dalam mendukung pembangunan kepemudaan di provinsi Kalimantan Timur, pemerintah bertanggung jawab memberi pelayanan kepemudaan salah satunya pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda dalam bentuk melibatkan para alumni/purna program JPI untuk berpartisipasi dalam implementasi program JPI ataupun berbagai bidang kegiatan kepemudaan lainnya

Kesimpulan dan Saran

1. Implementasi kebijakan pemberdayaan pemuda melalui program Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur secara umum sudah berjalan dengan baik, terlihat dari beberapa capaian indikatornya antara lain:
 - a) Standar (ukuran) dan sasaran kebijakan/program JPI dalam implementasi yang dilaksanakan setiap tahunnya ini telah sesuai dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan dari program JPI serta tujuan dan sasaran yang diharapkan sesuai dengan hasil yang dicapai.
 - b) Dukungan sumber daya kebijakan, seperti SDM yang terlibat dalam implementasi program JPI sudah cukup memadai dengan dibantu secara keseluruhan baik dari internal Dispora Kaltim sendiri, beberapa tim seleksi dan tim pembekalan peserta serta dukungan penuh dari DPD PPMI Kaltim sebagai mitra pembangunan kepemudaan melalui Program JPI di Provinsi Kalimantan Timur, selain itu, dukungan sumber pendanaan yang cukup dari anggaran yang setiap tahunnya dialokasikan melalui APBD Dispora Kaltim sangat menentukan keberhasilan dalam implementasi program JPI di provinsi Kalimantan Timur.
 - c) Untuk karakteristik badan pelaksana, dapat disimpulkan bahwa sudah terlihat ketegasan peran Dispora Kaltim sebagai implementator dalam implementasi kebijakan pemberdayaan pemuda melalui program JPI di provinsi Kalimantan Timur yang dimuat dalam sebuah Surat Keputusan (SK) yang didalamnya terdapat pengorganisasian pelaksanaan kegiatan berdasarkan struktur birokrasi yang ada yang bertugas dan bertanggung jawab dalam implementasi program JPI di lapangan.
 - d) Proses komunikasi antar organisasi terkait dan aktivitas kegiatan pelaksanaan dalam implementasi kebijakan pemberdayaan pemuda melalui program JPI di Kalimantan Timur sudah tergolong baik

dengan memanfaatkan saluran komunikasi formal melalui rapat koordinasi maupun nonformal melalui saluran komunikasi lainnya. Komunikasi utama yang telah terbentuk dimanfaatkan dalam aktivitas kegiatan pelaksanaan sebagai bahan monitoring dan pelaporan dalam implementasi program JPI di lapangan. Selain itu, dalam proses komunikasi dan koordinasi antar implementator yang terkait digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memastikan pencapaian standar dan tujuan kebijakan sesuai dengan yang diharapkan oleh pelaksana kegiatan.

- e) Selanjutnya sikap para pelaksana dalam implementasi kebijakan pemberdayaan pemuda melalui program JPI dalam pembangunan kepemudaan di Kalimantan Timur sudah menerima dan memahami apa saja yang menjadi standar dan tujuan dari program JPI agar dapat berjalan dengan baik.
- f) Kondisi lingkungan ekonomi, masyarakat Kaltim bisa dikatakan baik serta sistem politik dan pemerintahan yang stabil dan kondusif yang mendukung kegiatan JPI ini berjalan dengan lancar dan sukses. Selain itu kondisi sosial yang sangat terbuka dan sangat membantu bagi peserta program JPI dalam menambah jaringan komunikasi yang akan bermanfaat untuk masa yang akan datang. Selain itu, program JPI dirasakan berdampak pada pembangunan kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur dengan bentuk nyatanya dapat meningkatkan kehidupan para alumni/purna program JPI baik dalam partisipasi di berbagai bidang kehidupan, kepemimpinan dan kesetaraan gender, maupun dalam bidang pendidikan dan kesehatan sebagai pengembangan individu bagi para alumni/purna program JPI serta dalam mengembangkan potensi dan peluang ekonomi, sehingga menciptakan lapangan dan kesempatan kerja baik bagi diri sendiri maupun pemuda lainnya di Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam rangka meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan pemuda melalui program JPI dalam pembangunan kepemudaan di provinsi Kalimantan Timur, beberapa saran dan masukan yang dapat diberikan dan penting untuk diperhatikan, adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah provinsi Kalimantan Timur dan seluruh stakeholder terkait dalam implementasi kebijakan pemberdayaan pemuda melalui program JPI dalam pembangunan kepemudaan di provinsi Kalimantan Timur, perlu adanya penanganan yang serius terutama dengan memberikan perhatian lebih terhadap kecukupan pendanaan melalui alokasi anggaran yang memadai dan disesuaikan dengan kebutuhan rangkaian pelaksanaan program JPI setiap tahunnya, karena hal ini sangat menentukan keberhasilan dan optimalisasi dalam implementasi kebijakan pemberdayaan pemuda melalui program JPI di provinsi Kalimantan Timur.

2. Bagi Dispora Kaltim dan seluruh stakeholder terkait agar meningkatkan dan mengoptimalkan peran dan persiapan di seluruh aspek kebutuhan pelaksanaan program JPI dengan cara berkoordinasi dan berkomitmen secara berkelanjutan dan terfokus dalam pencapaian standar (ukuran) dan tujuan dalam implementasi kebijakan pemberdayaan pemuda melalui program JPI dalam pembangunan kepemudaan di provinsi Kalimantan Timur sehingga dapat berjalan sebagaimana target yang sudah ditetapkan. Selain itu, perlu ditingkatkan lagi dukungan pemerintah melalui Dispora Kaltim dan stakeholder terkait yang berada di daerah (Kab/Kota) dalam memberikan kegiatan setelah program JPI selesai dilaksanakan agar dapat memacu peran aktif dan partisipasi pemuda alumni program JPI dalam membantu pemerintah mewujudkan pembangunan kepemudaan di provinsi Kalimantan Timur.
3. Bagi DPD PPMI Kaltim sebagai mitra Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dispora Kaltim untuk lebih meningkatkan peran serta dalam membantu dan bekerja sama untuk pengembangan dan pembinaan pemuda dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur melalui program JPI secara berkelanjutan dan meningkatkan kesadaran dan pengabdian dalam rangka untuk membangun sumber daya pemuda yang maju, berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing serta juga handal dalam segala bidang.

Daftar Pustaka

- Anonim. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang *Kepemudaan*.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Statistik Pemuda Indonesia 2017*. BPS: Jakarta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Edisi Ke-2 Revisi. Gava Media: Yogyakarta.
- Bappenas. 2017. *Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2017*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Jakarta.
- Kemenpora. 2017. *Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2019*. Kementerian Pemuda dan Olahraga RI: Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy*. Edisi Keenam. PT Elex Media Komputindo: Jakarta
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media: Yogyakarta.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media: Yogyakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2014. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Bumi Aksara: Jakarta.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Intermedia: Jakarta.